

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

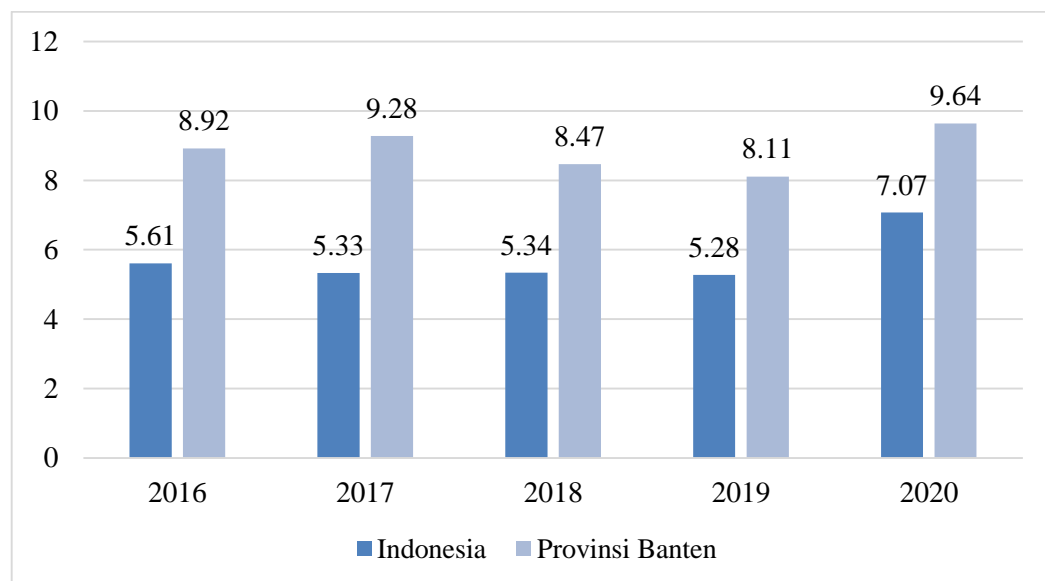
Pembangunan ekonomi adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan perluasan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, tetapi juga harus mencakup bagaimana pendapatan didistribusikan ke seluruh masyarakat dan siapa yang diuntungkan dari pembangunan ekonomi tersebut (Sukirno, 2016). Beberapa indikator ekonomi dapat digunakan untuk menentukan perkembangan ekonomi suatu negara, salah satu di antaranya adalah pengangguran.

Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang harus ditangani. Pengangguran muncul sebagai akibat dari tingkat perubahan angkatan kerja yang tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang beragam, dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah (Suhendra & Wicaksono, 2020). Hal tersebut mengakibatkan pengangguran termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial. Dalam masalah ekonomi pengangguran berarti menyia-nyiakan sumber daya yang berharga, sedangkan dalam masalah sosial adalah menjadikan penderitaan yang cukup besar bagi para pekerja yang menganggur karena harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang.

Dalam kaitannya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami masalah pengangguran. Menurut Suhendri (2021) pengangguran di Indonesia timbul karena dalam pasar tenaga kerja jumlah penawaran tenaga kerja

yang ada lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penawaran tenaga kerja di Indonesia tidak sejalan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan (BPS Indonesia, 2021). Di samping itu, salah satu provinsi yang merupakan penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Banten. Menurut data BPS Indonesia (2021) rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Banten dinyatakan berada di urutan ke-2 dari 34 provinsi di Indonesia.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran di Indonesia dan Provinsi Banten Tahun 2016-2020



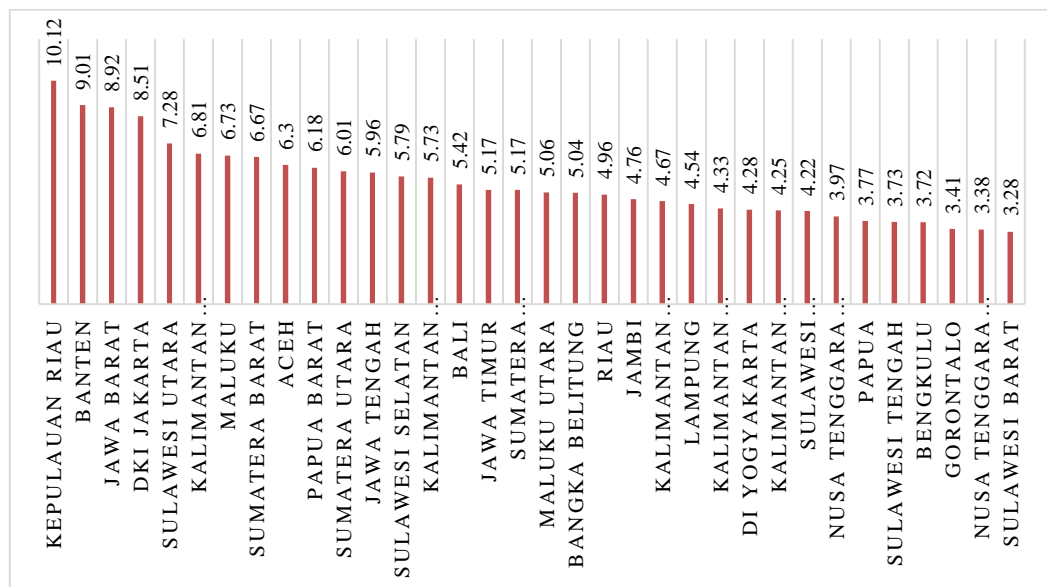
Sumber : BPS Indonesia dan BPS Banten, 2021

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten masih melebihi tingkat pengangguran di Indonesia. Dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia hanya berada diatas 5 persen, sedangkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten melambung tinggi diatas 7 persen (BPS Indonesia, 2021). Hal tersebut didukung oleh data yang menunjukkan bahwa

setiap tahunnya tingkat pengangguran di Provinsi Banten dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran sebesar 8,92 persen dan pada periode 2017 menjadi 9,28 persen. Penurunan tingkat pengangguran terjadi di tahun 2018-2019 sebesar 8,47 persen dan 8,11 persen, kemudian mengalami peningkatan 9,64 persen pada tahun 2020. Hal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan mengingat Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa sejumlah kawasan industri di Provinsi Banten digunakan sebagai percontohan dalam pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa.

Gambar 1.2 Rata-Rata Tingkat Pengangguran 34 Provinsi di Indonesia

Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Indonesia, 2021

Diketahui pada gambar 1.2 bahwa rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Banten selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 9,01 persen, angka tersebut sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi di semua kalangan sosial dalam masyarakat, dimana pemerataan ekonomi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat (BPS Banten, 2021). Serta menggambarkan pula keberhasilan Provinsi Banten dalam menanggulangi masalah pengangguran belum sepenuhnya berhasil.

Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk sebesar 11,91 juta jiwa penduduk pada tahun 2020. BPS Banten (2021) menjelaskan bahwa Provinsi Banten memiliki penduduk berusia 15-54 tahun sekitar 57,04%, artinya lebih dari setengah penduduknya berada di usia produktif. Tentu saja ini merupakan modal penting sekaligus juga tantangan bagi pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan jumlah penduduk yang melimpah agar terakomodir dalam lapangan kerja. Namun potensi sumber daya manusia yang sangat besar itu, tidak diimbangi kemampuan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Tingginya pengangguran di Provinsi Banten disebabkan oleh kurangnya penyerapan tenaga kerja dari berbagai sektor industri, ketersediaan lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah angkatan kerja, tidak meratanya hasil pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang besar, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja (BPS Banten, 2021).

Tidak meratanya hasil pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah masalah yang tidak dapat dihindari oleh berbagai daerah di Indonesia. Menurut Sukirno (2016) peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan memacu tumbuhnya industri

baru, sehingga berpotensi menyerap tenaga kerja baru serta menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian BPS Banten (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten hanya difokuskan terhadap pembangunan kawasan industri tanpa diimbangi dengan realisasi penerimaan tenaga kerja. Di sisi lain banyak masyarakat Provinsi Banten yang masih tinggal di daerah pedesaan, sehingga hasil pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih banyak dirasakan daerah perkotaan (Irawan, 2021).

Selain itu Provinsi Banten adalah provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah angkatan kerja serta berdampak pada masalah utama dalam pengangguran (BPS Banten, 2021). Menurut Murni (2016) pada dasarnya peningkatan jumlah angkatan kerja memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu angkatan kerja yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, akan tetapi di sisi lain jika kebijakan dan peraturan yang dibuat tidak tepat sasaran berakibat timbulnya permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Tingginya angkatan kerja apabila tidak disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka masyarakat tidak akan mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengangguran adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia suatu daerah juga merupakan permasalahan mendasar pengangguran. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia. IPM menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Menurut Mahroji & Nurkhasanah (2019) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan, dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk berkerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Dalam penanggulangannya Pemerintah Provinsi Banten terus bekerja untuk menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan di berbagai sektor guna mengimbangi adanya tambahan angkatan kerja baru yang bertambah setiap tahunnya. Menurut BPS Banten (2021) pemerintah Provinsi Banten berupaya secara konsisten membuka peluang 1 juta lapangan kerja. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Disnakertrans Banten (2021) yang menyatakan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan yang terus dilakukan, membuka beragam *job fair* di daerah serta memberikan pelatihan kepada lulusan SMK melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Namun kerja keras pemerintah Provinsi

Banten belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini terlihat bahwa pengangguran di Provinsi Banten masih sangatlah tinggi.

Dari berbagai uraian diatas terlihat bahwa fenomena tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten dinyatakan berada di urutan ke-2 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya penyerapan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja yang tidak sesuai, tidak meratanya hasil pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja yang besar, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja. Menurut BPS Banten (2021) mencatat masih ada 8,4 juta orang yang menganggur pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 8,1 juta orang. Walaupun sepanjang tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah industri di Provinsi Banten, akan tetapi peningkatan tersebut tidak mampu menurunkan angka pengangguran dan menurunkan predikat Provinsi Banten sebagai provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Sebaliknya angka pengangguran yang tinggi menggambarkan fokus upaya pemerintah mengatasi pengangguran tidak tepat sasaran. Sehingga dari pernyataan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap fenomena-fenomena tersebut yang di aktualisasikan dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran di Provinsi Banten”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai konsep uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Banten?
2. Bagaimana Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Provinsi Banten?
3. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di Provinsi Banten

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui apakah angkatan kerja berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Banten.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini mencakup data *time series* selama kurun waktu tahun 2009-2020 pada Provinsi Banten. Data – data dalam penelitian ini di dapatkan dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Banten.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran. Dimana pengangguran adalah variabel dependen. Sedangkan variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Peneliti : Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Banten.
- b. Untuk Universitas : Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Banten.
- b. Untuk Pembaca : Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Serta dapat menambah referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Banten.